

Belum lama ini perdebatan mengenai bentuk payung hukum penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menghangat di media massa. Rencana pemerintah tersebut telah membuat kalangan pengusaha gelisah karena keberadaan payung tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan maraknya pungutan di berbagai daerah, sehingga beban operasional perusahaan akan tinggi. Jika beban operasional tinggi, maka industri tidak akan kompetitif karena harga jual produk akan naik. Di sisi lain, beban pengusaha untuk mengurangi potensi konflik *horizontal* dengan masyarakat sekitar lokasi usaha mereka belum tentu berkurang dengan diberlakukannya payung hukum mengenai tanggung jawab sosial atau yang juga dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Potensi konflik horisontal ini muncul seiring dengan adanya transformasi lingkungan masyarakat yang awalnya rural menjadi semi-urban. Masyarakat rural yang lebih normatif dipertemukan dengan industri yang sistemik dan modern, sehingga menimbulkan konflik. Konflik tentunya memunculkan resiko dan ancaman sebagai bagian konsep modernisasi. Di dalamnya terlibat keputusan dan strategi untuk mengantisipasi supaya resiko dan ancaman tidak menjadi kenyataan.

Masyarakat Berisiko Tinggi

Ulrich Beck, seorang profesor sosiologi dari Jerman memulai pembahasan mengenai resiko dengan pertanyaan kunci: apakah 'makna sebenarnya' resiko dan apa definisi resiko? Beck kemudian merumuskan bahwa resiko bukanlah sebuah bencana, bukan pula sebuah kotak pandora. Akan tetapi, resiko muncul dari sebuah ketidakpastian yang menjadi fenomena tersendiri dari sebuah kegiatan/operasi. Profesor di Munich University sekaligus London School of Economics ini, melalui bukunya *Risk Society: Towards a New Modernity* (1998) menjelaskan resiko adalah segala kemungkinan-kemungkinan kerusakan fisik (termasuk mental dan sosial) yang disebabkan oleh proses teknologi dan proses-proses lainnya, seperti proses sosial, politik, komunikasi, dan seksual. Resiko, dengan demikian, mempunyai hubungan yang erat dengan sistem dan proses perubahan di dalam sebuah masyarakat dan akan menentukan tingkat resiko yang akan dihadapi oleh masyarakatnya.

Relasi sosial berubah seiring hadirnya modernisasi yang reflektif. Resiko ada di dalam struktur masyarakat dalam jumlah



RISIKO SOSIAL DAN PROTEKSI ASET

Tanggung jawab sosial perusahaan ibarat dua sisi mata uang bila berkaitan dengan masalah keamanan aset perusahaan. Keduanya tidak terpisahkan. Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan akan terhindar dari potensi terjadinya konflik horisontal dengan warga masyarakat.

yang tidak merata dan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan. Beck mengungkapkan bahwa resiko sebenarnya mengandung efek bumerang di mana individu yang menciptakan resiko akan mengalaminya sendiri. Misalnya pengusaha yang menciptakan polusi akan menderita jika polusinya mencemari sumber air minum.

Yasraf Amir Piliang menulis dalam artikelnya yang berjudul *Masyarakat Berisiko Tinggi* menuliskan bahwa setidaknya ada tiga kondisi yang membentuk resiko. *Pertama*, resiko "diproduksi" oleh sistem sosial yang sebenarnya diharapkan mengelola dan mengontrol resiko. *Kedua*, besarnya resiko merupakan fungsi langsung dari kualitas relasi dan proses sosial. *Ketiga*, resiko tinggi disebabkan oleh ketergantungan besar masyarakat yang terkena resiko pada institusi atau aktor-aktor sosial yang justru asing, jauh, atau tak tersentuh oleh mereka. Buruknya kualitas relasi sosial dan proses sosial akan

mempertinggi tingkat resiko yang dihadapi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat yang hidup di sekitar lokasi industri selalu memiliki ekspektasi tinggi terhadap industri yang beroperasi di wilayahnya. Tuntutan lapangan pekerjaan, kontrol limbah, sumbangan sosial, hingga uang 'jago' keamanan, mewarnai hiruk pikuknya perkembangan industri di tanah air. Kondisi ini terjadi karena tidak berjalannya proses transformasi dan relasi sosial yang tidak berjalan, sehingga masyarakat yang berhadapan dengan gerak industri akhirnya memiliki ketergantungan kepada industri. Ketergantungan ini tidak dapat dihindari oleh para pelaku usaha karena resiko sosial yang akan dihadapi dan ketidakmampuan institusi pemerintahan dalam menghambat dan mengelola gejolak sosial di masyarakat.

Proteksi Aset

Sejak masyarakat terkena euforia reformasi, muncul keberanian untuk



SECURITY JOURNAL/Arjogong

beraspirasi dan mengekspresikan tuntutan terhadap perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan filterisasi terhadap dunia usaha yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh *capital gain* atau *profit* dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah.

Security Journal kemudian melakukan liputan mengenai sejauh mana penerapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap menurunnya resiko sosial dan meningkatkan proteksi aset perusahaan. Mengutip Djimanto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia, ada tiga permasalahan utama dalam penerapan CSR di Indonesia. *Pertama*, kebijakan atau peraturan yang sebenarnya tidak meredam potensi konflik

horizontal. *Kedua*, kecemburuan masyarakat terhadap industri yang padat modal dan teknologi. *Ketiga*, rendahnya pengetahuan warga mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

Artinya kontribusi CSR dalam proteksi keamanan sebenarnya bukanlah sebuah metafora mengingat tingginya *social risk* bagi investasi di Indonesia. Setidaknya, berdasarkan konsepsi *Crime Prevention Through Environmental Design* Richard Gardner, wilayah pinggiran yang tidak terbina dengan baik dapat menjadi sebuah generator kejahatan yang mengancam wilayah pusat. Oleh karenanya *Security Journal* mencoba mengali dinamika sosial yang berkembang di masyarakat sekitar kawasan industri sebagai dampak dari pembangunan di kawasannya. Ada 2 cara memperediksikan dampak sosial pembangunan yakni:

- Memahami perilaku individu dan masyarakat akibat perubahan kebijakan, pembangunan, dan perilaku perusahaan
- Mengidentifikasi adanya dampak negatif pembangunan sebelum dampak tersebut muncul guna mempersiapkan langkah mitigasi

Dinamika sosial yang muncul kemudian ditangkap dengan mengambil gambaran *snapshot* dari waktu ke waktu, mulai dari pembangunan kawasan tersebut belum dimulai hingga pembangunan itu selesai dan berjalan. Dampak sosial diidentifikasi sebagai perubahan yang terjadi di antara proses yang terjadi sebelum dan sesudahnya.

Dinamika inilah yang seharusnya tertangkap dan dirumuskan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya. Mengutip Richard Gardner dalam bukunya *Design for Safe Neighborhood* (1978), bahwa konsepsi teritorialisme dalam pengamanan wilayah berkaitan dengan aktivitas dan potensi kerawanan yang ada, termasuk diantaranya rasa kepemilikan penduduk. Oleh karenanya diperlukan satu tindakan terencana berkaitan dengan ancaman yang dimungkinkan terjadi di sebuah wilayah.

Cileungsi dan Pasar Kemis

Security Journal kemudian memilih kawasan industri di Cileungsi, Bogor, dan Pasar Kemis, Tangerang, sebagai lokasi liputan untuk tema kali ini. Adapun alasan-alasan pemilihan kedua kawasan ini adalah:

- Kondisi masyarakat dalam proses peralihan dari komunitas rural menuju

urban yang ditandai dengan perubahan komposisi populasi dan tercipta segregasi ruang antar kelompok

- Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pemukiman sehingga jumlah warga musiman tinggi. Mereka hanya bermukim selama industri masih berjalan dan mereka akan meninggalkan kawasan tersebut ketika industri lumpuh atau bangkrut
- Ketersediaan infrastruktur publik yang belum memadai sehingga warga musiman enggan untuk menjadi warga tetap di kawasan tersebut
- Infrastruktur pendidikan yang belum memadai kualitasnya bagi perkembangan sumber daya manusia, sementara kebutuhan industri akan *skilled labor* tidak dapat ditawarkan

Cileungsi yang awalnya dikenal dengan bambu dan buah rambutannya serta kawasan Pasar Kemis yang awalnya dikenal sebagai daerah kering yang tidak cocok untuk lahan pertanian, kini menjadi kawasan yang dihuni oleh puluhan industri yang proses produksinya berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Konsepsi kawasan industri sebagai sebuah kawasan terbatas tidak berlaku sepenuhnya di kedua kawasan ini. Letak industri di kawasan Cileungsi misalnya, tepat berada di tepian Jl. Raya Narogong yang dapat di akses dari berbagai penjuru. Dampaknya adalah terganggunya akses masyarakat karena terputusnya atau termodifikasinya jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan pemukiman dengan jalan utama akibat kehadiran kawasan industri. Hal yang kurang lebih serupa terjadi di Pasar Kemis, di mana jalan-jalan desa rusak karena tidak sanggup menahan beban jalan yang dilalui truk berukuran besar, sementara jalan utama sudah dipenuhi oleh industri-industri raksasa.

Apakah program tanggung jawab sosial perusahaan juga menyentuh permasalahan penyediaan dan perbaikan infrastruktur publik? *Sau hal yang harus dicamkan* adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang kini dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* ini merupakan tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan relasi antar manusia, manusia yang menggerakkan roda industri dengan manusia yang berada di sekitar wilayah industri. (AP)